

DPRD PROVINSI GORONTALO

FRAKSI NasDem AMANAT

Jln. Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo

REKOMENDASI

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TAHUN 2020

Fraksi NasDem – Amanat setelah melakukan kajian terhadap dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2020, di sandingkan dengan dokumen Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2017Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor10tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dengan ini merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragaterdapat program dan 1. dituangkan dalam mata anggaran kegiatan vang dilaksanakan refocusing anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Mentri Keuangan Nomor SKB 119/2813/SJ, Nomor 117/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional kegiatan tersebut adalah Kegiatan revitalisasi penambahan ruang kelas baru (RKB) SMA/SLB, Kegiatan penyediaan media pembelajaran alat praktek dan SMA/SLB dan alat peraga siswa beberapa kegiatan dimanadalam dokumen LKPJ menunjukkan tingkat capaian diatas 90% Realisasi keuangan dan Capaian 100%.Dengan demikian sangat dibutuhkan penjelasan secara terinci atas ketidakpatuhan ini? REKOMENDASI bahwa kebijakan pembangunan sarana prasarana melakukan analisis terperinci atas azas kemanfaatan anggaran yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi darurat yang terjadi.



DPRD PROVINSI GORONTALO FRAKSI NasDem AMANAT

Jln. Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo

NasDem Amanat

- Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahragadalam Program dan 2. Kegiatan pelatihan proktor ujian sekolah madrasah output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan proktor ujian bagi sekolah madrasah sejumlah 150 orang. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya penghapusan Ujian Nasional oleh Kementrian. Program ini patut dipertanyakan dimana terjadi serapan capaian keuangan 100%, capaian fisik 100% dan didalam output dijelaskan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya penghapusan ujian nasional oleh kementrian? REKOMENDASI penguatan terhadap audit dan pemanfaatan anggaran internal terhadap peruntukannya.
- 3. Dinas Kesehatan terdapat Program dan Kegiatan menunjukkan tingkat capaian fisik 100 % akan tetapi tingkat capaian keuangan dibawah 90% adapun program dan kegiatan tersebut diantaranya Pelayanan Medik RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Regular)Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik) dan beberapa kegiatan lainnya. Kondisi ini menunjukan bahwa ketidak telitian dan ketepatan dalam menentukan pagu Anggaran setiap program dan kegiatan dan menjadi catatan dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), REKOMENDASI pelaksanaan audit perencanaan mewujudkan efisiensi sasaran program atau kegiatan dengan ketersediaan anggaran.
- Dinas Kesehatan terdapat Program dan Kegiatan Jamkesta Output 4. dari kegiatan ini adalah Penduduk Miskin yang didaftarkan ke BPJS mendapat Jaminan Kesehatan selama 12 Bulan berjumlah 91.827 Jiwa tingkat capaian keuangan 81,88%, dan tingkat capaian fisik 100 %. Program Kegiatan ini menunjukkan keberpihakkan urusan wajib tidak secara totalitas untuk rakyat Gorontalo sebab begitu banyak masyarakat yang tidak mendapatkan tidak mampu lavanan Jamkestasementara terserap 81,88%. anggaran REKOMENDASI bahwa keberpihakkan anggaran untuk mengcover seluruh masyarakat yang masuk dalam data DTKS tercover dalam Jaminan Kesehatan. Universal Health Coverge menyeluas untuk rakyat di Kabupaten Kota



DPRD PROVINSI GORONTALO FRAKSI NasDem AMANAT

Jln. Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo

- 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Program dan Kegiatan membutuhkan ketelitian dalam penentuan pagu anggaran dalam hal ini kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan berkala jalan Provinsi tingkat capaian fisik 100% sementara tingkat capaian keuangan 61,69 %. Kondisi ini menunjukkan ketidakcermatan dalam perencanaan penentuan pagu anggaran. Sehingga terdapat tingkat capaian keuangan/serapan keuangan dalam program dan kegiatan terdapat selisih anggaran yang cukup besar. REKOMENDASI melakukan evaluasi dan audit perencanaan.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam pagu anggaran Program dan Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran Provinsi (Dok. LKPJ) sebesar Rp.17.515.460.183,-. Merujuk pada dokumen APBD-Induk pagu anggaran sebesar Rp.11.214.984.946,- Hal ini menunjukkan terdapat selisih sebesar Rp. 6.300.475.237,- dari APBD-Induk dan Pagu LKPJ. Perlu dilakukan pendalaman dan penyajian secara terbuka atas perbedaan selisih tersebut, serta penjelasan atas ketidakpatuhan terhadap regulasi sebab Program dan Kegiatan ini seyogyanya dilakukan Refocusing anggaran tetapi justru melakukan penambahan anggaran dalam LKPJ Gubernur. Jika Penjelasan Kaban Keuangan Tambahan Anggaran bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sementara dalam Laporan KPJ ini tambahan anggaran dana PEN di peruntukkan jalan dan jembatan. **REKOMENDASI** pembangunan seyogyanya besaran anggaran dalam setiap program dan kegiatan mendukung tercapainya siklus perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD.
- 7. Dinas Sosial Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Anggaran bantuan sosial sangat besar sampai puluhan milyar. REKOMENDASI kedepannya, Bansos diarahkan ke bansos pemberdayaan masyarakat. Penerima bansos harus jelas sesuai data DTKS. Jenis bansos harus memberdayakan produk lokal agar ekonomi rakyat hidup.



DPRD PROVINSI GORONTALO FRAKSI NasDem AMANAT

Jln. Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo

- NasDem Amanat
- 8. Dinas Sosial Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat Program dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran pagu anggaran dalam LKPJ sebesar Rp.1.327.378.671.dan Pagu APBD-Induk sebesar Rp.1.111.711.500,-. Terdapat selisih antara Pagu APBD-Induk dan dokumen pagu anggaran yang ditunjukkan dalam dokumen LKPJ yakni terdapat selisih 215.667.171,-.Hal ini merupakan kondisi terburuk dalam perumusan APBD-Induk serta Dokumen LKPJ Gubernur dan perlu dilakukan tindakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi kenaikan pagu anggaran yang bersumber dari Dana CSR maka dapat dicantumkan dalam dokumen LKPJ ini. REKOMENDASI melakukan evaluasi terhadap anggaran yang ditunjukkan pada program dan kegiatan sarana dan prasarana perkantoran. DanMohon penjelasannya mengenai keberadaan kenderaan Operasional CSR Sulutgo?
- 9. Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, Terdapat Program dan Kegiatan Pemagangan berbasis pengguna sebesar Rp. 1.089.495.000,- dari APBD-Induk 1.132.495.000,-. Perlu penjelasan secara menyeluruh atas program dan kegiatan ini, dimana pelaksanaan program dan kegiatannya dan jenis pemagangan seperti apa yang dilakukan, serta Bagaimana Program dan Kegiatan ini dilakukan semasa pandemi? REKOMENDASI melakukan evaluasi terhadap kepatuhan regulasi dalam setiap program dan kegiatan yang telah teranggarkan.
- 10. Dinas Perindustrian dan perdagangan Koperasi dan UMKM, terdapat alokasi anggaran untuk program dan kegiatan khusus pada alokasi anggaran sarana dan prasarana perkantoran sangat tinggi dan tidak melakukan rasionalisasi 50% sesuai dengan regulasi refocusing anggaran. Hal ini terbalik dengan Dana pembinaan dan penghargaan koperasi sangat rendah. Jika setelah refocusing ini justru malah dipangkas, maka dapat dipastikan kegiatan ini dianggap tidak strategis/penting bagi dinas. Padahal, kegiatan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Anggaran kegiatan tergolong rendah. Sementara, kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku



DPRD PROVINSI GORONTALO FRAKSI NasDem AMANAT

Jin. Sapta Marya Kel. Betu Kec. Dumbe Raya Keta Gerontale

usaha dalam mengakses dana kredit. REKOMENDASI sasaran program dan kegiatan harus mendukung terarah dan terukur untuk pencapain visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

- 11. Dinas Puriuisata, terdapat Program dan Kegiatan Pengembangan Promosi Seni Budaya PariwisataPerlu ditinjau kembali standar harga pembuatan video promosi. Jika promosi video hanya disebarluaskan hanya lewat videotron bandara, maka kegiatan dengan biaya yang sangat tinggi adalah kegiatan yang mubazir. Pagu anggaran APBD-Induk sebesar Rp. 1.188.801.500, Dan Anggaran pada LKPJ sebesar Rp. 625.128.900, REKOMENDASI dapat dilakukan perhitungan anggaran dan besarannya serta asas manfaat utuk pembangunan daerah.
- 12. Dinas Pariwisata, Anggaran Pariwisata UMKM juga kecil padahal visi Gubernur adalah pariwisata mendunia. UMKM adalah ujung tombak ekonomi rakyat. REKOMENDASI menaikkan anggaran pariwisata dan fokus pembenahan infrastruktur pariwisata, kapasitas SDM pelaku, perbaikan akses dan promosi bersama Kabupaten/Kota
- 13. Dinas Sekretariat Daerah, Terdapat Kegiatan dan Program Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui Radio Suara Rakyat Hulondalo Dalam APBD-Induk sebesar RP. 1.332.345.000,-,sedangkan Dana LKPJ sebesar Rp. 1.166.836.433,- REKOMENDASI: Apakah telah memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Penyelenggaraan Penyiaran Tentang 2005 Penyiaran Publik ? Dan bagaimana dengan Radio yang disiarkan oleh Radio Suara Rakyat Hulontalo?Keberadaan radio RH sesuai UU Penyiaran hanya dikenal penyiaran publik dan di daerah ada RRI. FAKTAnya Radio suara RH telah mengambil alih peran RRI dan banyak membuat radio-radio swasta lokal kesulitan karena anggaran pemprov hanya untuk radio RH. REKOMENDASI pendanaan lewat APBD untuk radio suara RH perlu dievaluasi kedepan. Distribusi anggaran ke berbagai Radio berdasarkan kinerja.



DPRD PROVINSI GORONTALO

FRAKSI NasDem AMANAT

Jln. Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo

- 14. Dinas Pertanian, anggaran pertanian sangat kecil padahal provinsi Gorontalo merupakan dasar pertanian. REKOMENDASI Presentasi dinaikkan dan titik berat untuk jalan usaha tani, perbaikan saluran, penyediaan bibit unggul, dan alat pertanian
- 15. Dalam dokumen LKPJ Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020 bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai angka diatas 103%. Realisasi seperti ini cukup baik dan membanggakan walaupun dalam kondisi wabah yang berkepanjangan. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa presentase capaian ini APBD Induk dan APBD Perubahan dengan Realisasinya. Uji pembuktian awal kita lihat Realisasi PAD sebesar Rp. 414.824.116.231 dinilai melebihi target capain ini yaitu sebesar 125,24%. Karena angka yang dicantumkan dalam APBD-P sebesar 328.214.595.818. Padahal sejatinya angka ini harus dibandingkan dengan target awal APBD induk yang mencantumkan PAD sebesar Rp. 461.928.720.749. Kalau demikian perhitungannya maka PAD tidak tercapai, malah berada dibawah angka 80%. Gaya menampilkan target dan capaian seperti ini berulang dalam komponen pendapatan bahkan dalam komponen belanja hal yang sama terulang. Dalam LKPJ tahun 2020, Target dan capaian itu diukur selama satu tahun, oleh karenanya tidak memenuhi harapan untuk mengukur kinerja belanja maupun pendapatan menggunakan angka APBD-P.
- 16. Dari 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Gorontalo tahun 2020 dalam realisasinya ada 8 indikator utama yang tidak tercapai, bahkan khusus untuk pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6.69%, capaiannya hanya -0,02%. Kondisi ini harus di jelaskan secara detail guna pencapaian program pembangunan di Provinsi Gorontalo.
- 17. REKOMENDASI secara umum, Dokumen LKPJ tahun anggaran 2020 dan APBD-Induk hampir seluruh OPD memiliki anggaran perencanaan. REKOMENDASI bahwadapat dijelasan asas manfaat dari perencanaan yang dilakukan.

Demikianlah Rekomendasi NasDem Amanat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2020.



DPRD PROVINSI GORONTALO

FRAKSI NasDem AMANAT

Jln. Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo

Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, % Mei 2021

DPRD PROVINSI GORONTALO

FRAKSI NasDem AMANAT

YURIKO KAMARU, S.F

Ketya

INDRIANI DUNDA

Sekretaris

Anggota

1. H. Sofyan Puhi, ST

2. Hj. Lolly Yunus

3. Indri Monoarfa

4. Ir. H. Irwan A. Berahim

5. H. Fadli Hasan, ST., M.SI

6. H. Ismail Alulu, SE

7. H. Adhan Dambea, S.Sos., SH., MA